



Strategi Gerakan Sosial Politik Masyarakat terhadap Tambang Pasir di Desa Sejagung Kabupaten Banyuasin

Putri Puspita Sari^{1*}, Reni Apriani², Ainur Ropik³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Correspondence: Putri Puspita Sari
Email: putripuspitasari2424@gmail.com

Received: 09-10-2025
Accepted: 17-11-2025
Published: 28-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Sand mining in Sejagung Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency, has caused significant social and environmental impacts, ranging from riverbank erosion, water pollution, and machine noise to the loss of community comfort. This study aims to analyze the strategies of community socio-political movements in responding to sand mining activities. Using a qualitative case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation involving community leaders, village officials, and affected residents. The findings reveal that the community movement emerged from disappointment toward the company and the village government, both perceived as neglecting residents' interests. Through the forum Masyarakat Sejagung Bersatu (United Sejagung Community), residents employed demonstrations, deliberations, and media as their main strategies to fight for the right to a healthy environment. An analysis using Alain Touraine's theory shows that the movement was shaped through the dimensions of identity, opposition, and totality, signifying both ecological and political resistance against corporate dominance and the village government's lack of transparency. This study concludes that the socio-political movement strategies of Sejagung villagers represent a collective struggle that not only

addresses local issues but also connects with broader concerns of environmental sustainability, social justice, and natural resource governance.

Keywords: Environmental activism, Community resistance, Sand mining conflict, Social movements, Sustainable resource management

Pendahuluan

Pertambangan pasir merupakan aktivitas yang sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia, terutama karena tingginya permintaan akan pasir sebagai bahan dasar konstruksi. Di balik kontribusi ekonominya, kegiatan ini sering kali menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Kurniawan & Fitriani, 2023). Fenomena ini terjadi di banyak wilayah pesisir di Indonesia, di mana data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 35% wilayah pesisir mengalami abrasi akibat penambangan pasir yang tidak terkontrol (Indriani et al., 2024). Contoh nyata dari dampak ini dapat dilihat di Desa Sejagung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, di mana aktivitas penambangan pasir selama bertahun-tahun telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Dampak tersebut mencakup degradasi ekosistem sungai dan abrasi sepanjang empat kilometer di bantaran sungai, sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pada tahun 2023.

Selain dampak lingkungan, penambangan pasir juga memicu gesekan sosial di masyarakat, membagi warga menjadi kelompok yang mendukung dan menolak. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2024, sekitar 90% warga secara langsung merasakan dampak negatif dari tambang, yang pada akhirnya memicu gelombang penolakan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Charles Tilly (2021) yang menyatakan bahwa gerakan masyarakat adalah serangkaian tindakan kolektif strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Di banyak negara, ketidakadilan sosial dan ekonomi menjadi pendorong utama munculnya gerakan semacam ini. Diskriminasi dan rasa ketidakpuasan mendalam mendorong individu untuk bersatu memperjuangkan hak-hak mereka, seperti yang diungkapkan oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani (2022). Kesadaran sosial terhadap ketidakadilan, baik dari pengalaman pribadi maupun informasi yang diperoleh dari media, mendorong keterlibatan aktif dalam gerakan sosial.

Kekayaan sumber daya alam Desa Sejagung, khususnya pasir, telah lama menjadi tumpuan ekonomi masyarakat, dengan pasir yang disalurkan ke berbagai daerah. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Anna Tsing (2019), eksploitasi sumber daya alam kerap menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konflik sering kali tak terhindarkan ketika aktivitas tambang tidak melibatkan partisipasi warga (Dewi et al., 2023). Masuknya perusahaan PD Prodexim pada tahun 2020 membawa perubahan besar dengan teknologi modern yang meningkatkan produktivitas dan menyediakan lapangan kerja sementara. Meski ada kontribusi sosial seperti pembangunan sarana publik, dampak negatif jangka panjang mulai dirasakan, termasuk abrasi sungai yang semakin parah, kebisingan mesin, dan ketidaktransparan dalam pengelolaan tambang. Warga merasa bahwa manfaat ekonomi yang mereka terima tidak sebanding dengan kerugian lingkungan dan sosial yang dialami, seperti yang dilaporkan oleh Buser24jam.com.

Krisis kepercayaan terhadap perusahaan dan pemerintah desa memuncak ketika masyarakat merasa keuntungan tidak dibagikan secara adil. Rasa ketidakpuasan ini mendorong lahirnya gerakan masyarakat yang menuntut penghentian tambang pasir. Aksi protes, termasuk demonstrasi di depan kantor Gubernur Banyuwasin dari November hingga Mei, menjadi bentuk perlawanan nyata, dengan tuntutan utama agar penambangan yang merusak lingkungan segera dihentikan (Harian Banyuwasin, 2024). Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat yang awalnya menerima tambang karena alasan ekonomi, kemudian bertransformasi menjadi kelompok yang menuntut penutupan tambang. Transformasi ini menunjukkan peran strategis gerakan masyarakat lokal dalam menghadapi ketimpangan lingkungan dan sosial akibat eksploitasi sumber daya (Pratama et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi gerakan sosial politik masyarakat dalam menghadapi aktivitas tambang pasir di Desa Sejagung. Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memperlihatkan bagaimana warga lokal menyusun langkah kolektif dan taktis untuk melawan praktik penambangan yang merugikan komunitas mereka, sekaligus menyoroti perlunya tata kelola sumber daya yang berkelanjutan dan partisipatif (Sari et al., 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dinamika perubahan sikap masyarakat dari penerimaan menjadi penolakan, serta bagaimana pengalaman konkret dari dampak tambang memicu

kesadaran kolektif sebagai "penjaga lingkungan" dan aktor politik aktif. Studi ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, dan keadilan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Metode Penelitian

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi gerakan sosial politik masyarakat Desa Sejangung dalam menanggapi aktivitas tambang pasir. Menurut Moleong (2017), metode kualitatif adalah rangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mendapatkan data secara logis dan memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik interaksi sosial dalam konteks alami. Pendekatan studi kasus dipilih agar peneliti dapat menggali secara mendalam dinamika gerakan masyarakat dan mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 2021). Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research), yang memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung dan berinteraksi dengan subjek penelitian di lokasi aslinya (Sudaryono, 2023). Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami motivasi, pola interaksi, dan makna di balik gerakan sosial dari sudut pandang para pelakunya sendiri (Emzir, 2022).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan, sebagaimana dijelaskan oleh Nazir (2014) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan secara berkelanjutan dan kontekstual, sejalan dengan model pengumpulan data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018). Sementara itu, data sekunder didapatkan dari berbagai sumber tidak langsung seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen media massa yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali perasaan dan motif informan, observasi langsung untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, dan dokumentasi sebagai pelengkap (Emzir, 2022).

Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Desa Sejangung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan relevansi isu yang ditemukan melalui survei awal dan observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif untuk memastikan representasi yang komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat. Mereka meliputi tokoh masyarakat yang aktif dalam gerakan (seperti kepala dusun dan ketua RT), perwakilan pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga terdampak langsung, dan warga yang bersikap netral. Pemilihan informan dari berbagai latar belakang ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang seimbang dan mendalam mengenai dinamika konflik yang terjadi.

Prosedur Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif berbasis studi kasus dengan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018). Prosedur ini mencakup empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana peneliti secara sistematis berinteraksi langsung dengan sumber data untuk menjaga validitas dan reliabilitas informasi (Faisal, dalam Moleong, 2017). Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses menajamkan, mengelompokkan, dan menyaring data agar hanya informasi yang relevan dengan rumusan masalah yang dipertahankan. Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi atau bagan yang mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti merumuskan interpretasi atas data yang diperoleh. Kesimpulan ini dapat berupa temuan baru yang memberikan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, seluruh proses penelitian dirancang secara sistematis untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell, 2021; Sudaryono, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Strategi masyarakat dalam perubahan social

Gerakan masyarakat yang muncul di Desa Sejangung tidak sekadar menjadi bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir, melainkan juga mencerminkan usaha kolektif warga dalam mendorong terjadinya perubahan sosial di tingkat lokal. Strategi yang ditempuh oleh masyarakat bersifat dinamis, selalu menyesuaikan dengan kondisi, serta menggambarkan adanya kesadaran bersama untuk memperjuangkan ruang hidup dan hak-hak yang mereka miliki. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, dan gerakan sosial sering kali hadir sebagai pemicu utama dalam perubahan tersebut.

Alain Touraine menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang bertujuan mengarahkan transformasi historis suatu masyarakat, yang muncul dari pertentangan antara kelompok dominan dan kelompok yang menolak dominasi tersebut. Dalam pandangan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai korban perubahan, melainkan juga sebagai aktor yang aktif menentukan bentuk dan arah perubahan itu sendiri. Touraine menegaskan bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam setiap gerakan sosial, yaitu prinsip identitas (siapa yang melakukan gerakan), prinsip oposisi (pihak mana yang menjadi lawan), dan prinsip totalitas (apa yang hendak diubah secara struktural). Melalui pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana masyarakat Desa Sejangung menyusun strategi untuk menanggapi aktivitas tambang pasir yang mereka anggap merugikan, meskipun tidak semua warga memiliki sikap yang sama terhadap keberadaannya.

Masyarakat Desa Sejangung menyalurkan penolakannya terhadap aktivitas tambang pasir melalui berbagai bentuk gerakan sosial yang mereka organisir. Jika ditinjau dari perspektif Touraine, gerakan ini merupakan upaya mempertahankan hak atas tanah, lingkungan, dan kehidupan yang lebih layak. Warga bertindak sebagai subjek utama yang berusaha membawa perubahan sekaligus melawan dominasi perusahaan maupun pemerintah desa yang mendukung keberadaan tambang. Untuk memperkuat perjuangan mereka, masyarakat kemudian membentuk sebuah wadah bernama *Masyarakat Sejangung*

Bersatu, yang menjadi sarana bagi warga terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran wadah ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat tidak bersifat spontan atau individual, melainkan terorganisasi secara struktural.



Gambar 2. Aksi Demonstrasi di Kantor Bupati Banyuasin

Sumber: Tintanusantara.co.id

Seperti disampaikan oleh salah seorang tokoh gerakan, aksi yang dilakukan bukan semata karena emosi sesaat, melainkan berangkat dari rasa kecewa dan ketidakpuasan yang telah lama dirasakan. Selama ini, warga merasa suara mereka diabaikan, sehingga mereka terdorong untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyatukan aspirasi agar lebih kuat dalam mendesak pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan yang muncul bersifat sadar, terencana, dan mengedepankan solidaritas kolektif sebagai kekuatan utama dalam menyampaikan tuntutan. Hasil observasi peneliti juga memperlihatkan bahwa aksi yang dilakukan *Masyarakat Sejangung Bersatu* bukanlah sekadar luapan kemarahan, tetapi merupakan langkah strategis yang dirancang bersama. Demonstrasi di tingkat Kabupaten Banyuasin, misalnya, menjadi bentuk nyata penegasan sikap masyarakat yang menolak keberadaan tambang.

Dalam perspektif teori Touraine, dimensi identitas menempati posisi penting karena berkaitan dengan kesadaran kelompok tentang siapa mereka dan apa yang diperjuangkan. Identitas tersebut terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat dalam menghadapi dampak buruk tambang pasir, seperti kerusakan sungai, abrasi, pencemaran air, dan terganggunya ketentraman akibat aktivitas alat berat. Melalui musyawarah maupun aksi demonstrasi, warga mulai membangun kesadaran bahwa mereka bukan hanya objek kebijakan perusahaan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk mempertahankan ruang hidupnya. Kesadaran ini membentuk identitas baru sebagai penjaga lingkungan yang dirugikan oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam, serta membedakan diri dari perusahaan sebagai pihak luar yang membawa kerusakan. Identitas kolektif tersebut memperkuat ikatan sosial warga sekaligus menjadi landasan moral dalam perjuangan mereka.

Aksi demonstrasi masyarakat pun berlangsung dengan melibatkan berbagai elemen, baik laki-laki, perempuan, maupun pemuda, yang berkumpul di ruang terbuka sambil

membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti “Kami masyarakat Desa Sejangung meminta kepada Bapak PJ Bupati untuk mengevaluasi kebijakan tambang”, “Tegakkan nilai keadilan dan konstitusi, warga ingin didengar dan dilibatkan”, serta “Mari wujudkan tata kelola desa yang bersih dan terbuka”. Tuntutan-tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi warga tidak semata-mata berkaitan dengan isu tambang, melainkan juga menyangkut kebutuhan akan tata kelola desa yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan mengenakan pakaian sehari-hari dan membawa bendera merah putih, masyarakat menunjukkan sikap nasionalisme, gotong royong, dan penghormatan terhadap nilai persatuan dalam memperjuangkan aspirasinya.

Keresahan masyarakat juga terlihat dari wawancara dengan salah seorang warga, yang menyatakan bahwa air sungai kini tidak lagi layak digunakan karena kualitasnya menurun, warnanya keruh, dan terasa lengket di badan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini semakin buruk sejak pergantian kepala desa, yang menurutnya justru membuat dampak tambang semakin besar. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perubahan kepemimpinan desa turut memengaruhi dinamika tambang dan menimbulkan rasa kecewa karena masyarakat merasa tidak lagi mendapatkan perhatian maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Pada awalnya, masyarakat Desa Sejangung tidak menolak keberadaan tambang, bahkan sebagian warga menilai aktivitas tersebut membawa manfaat bagi desa, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi, dan memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Namun, sejak adanya pergantian kepala desa, muncul perasaan bahwa pemerintah desa semakin tertutup dalam mengelola pertambangan, terutama karena minimnya komunikasi dan sosialisasi kepada warga terkait izin maupun perkembangan tambang. Hal ini ditegaskan oleh Pak Dedi Sumanthro selaku Ketua RT yang menuturkan bahwa pada masa lalu warga setidaknya diundang dalam rapat atau sosialisasi, tetapi setelah pergantian kepemimpinan, tidak ada lagi keterlibatan masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan jarak antara warga dan pemerintah desa, sekaligus melahirkan kekecewaan kolektif. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat akhirnya bukan hanya sekadar menolak tambang pasir, melainkan juga menjadi ekspresi perlawanan terhadap sistem pengambilan keputusan yang menutup ruang partisipasi publik. Warga menuntut untuk didengar, dilibatkan, dan dihormati sebagai bagian penting dari pembangunan desa. Dengan demikian, gerakan sosial di Desa Sejangung dapat dipahami bukan hanya sebagai protes ekologis, tetapi juga sebagai gerakan politik masyarakat untuk menegaskan identitas, hak, serta peran mereka dalam menentukan arah perubahan desa.

1. Dimensi Oposisi

Dimensi oposisi dalam teori gerakan sosial Alain Touraine menjelaskan siapa atau apa yang diposisikan sebagai lawan utama dari suatu gerakan. Lawan ini bisa berupa individu, kelompok, ataupun institusi yang dianggap menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan kolektif. Keberadaan oposisi sangat penting, sebab gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh identitas atau siapa yang melakukan, tetapi juga oleh siapa yang mereka hadapi. Tanpa adanya pihak yang jelas untuk ditentang, arah

perjuangan akan sulit dipetakan. Dalam kasus penolakan masyarakat terhadap tambang pasir di Desa Sejangung, pihak yang dipersepsikan sebagai oposisi utama adalah perusahaan tambang beserta pihak-pihak yang mendukung aktivitas tersebut. Perusahaan dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan yang nyata, sementara pemerintah desa juga dipandang sebagian warga sebagai bagian dari lawan karena sikapnya yang lebih condong mempertahankan keberlanjutan tambang dengan alasan peningkatan pendapatan desa.

Meski demikian, dari sudut pandang pemerintah desa, mereka mengklaim telah berusaha menjalankan peran sebagai penengah di tengah ketegangan antara masyarakat dan perusahaan. Kepala desa dan perangkatnya beberapa kali menginisiasi forum mediasi, baik di balai desa maupun rumah tokoh masyarakat, dengan harapan dapat mencairkan suasana sekaligus menemukan titik temu. Pemerintah desa mengakui banyak warga mengeluhkan dampak lingkungan, seperti bisingnya suara mesin, air sungai yang berminyak, serta ancaman longsor yang mengintai pemukiman di sekitar aliran sungai. Namun, mereka juga menilai bahwa tambang sempat memberi kontribusi positif melalui program *corporate social responsibility* (CSR).

Kepala Desa, misalnya, menegaskan bahwa perusahaan pernah membantu perbaikan jalan desa sebagai wujud tanggung jawab sosial. Menurutnya, program CSR tidak sekadar kompensasi, tetapi bentuk kepedulian perusahaan yang perlu dikelola lebih transparan agar tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan CSR seharusnya mampu memberi rasa aman bagi warga. Apabila ada masalah mendesak, masyarakat diminta menyampaikan melalui pemerintah desa untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak perusahaan. Dengan cara itu, pemerintah desa berusaha membangun citra bahwa perusahaan tidak sepenuhnya membawa dampak negatif, karena masih ada manfaat yang bisa dirasakan warga.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagian besar warga merasa skeptis terhadap keberadaan CSR yang dianggap tidak benar-benar menjawab permasalahan, terutama soal pencemaran air, kebisingan, dan ancaman longsor. Banyak di antara mereka tetap menuntut agar tambang ditutup secara permanen. Kepala desa sendiri mengakui bahwa posisinya sulit, berada di antara warga yang marah karena dampak lingkungan dan perusahaan yang sebelumnya memberi kontribusi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang demonstrasi, asalkan tetap dilakukan dengan damai, meskipun berharap ada ruang dialog agar konflik tidak semakin tajam.

Sikap pemerintah desa ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang cukup mendasar dengan mayoritas warga. Kepala desa secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah masih berharap tambang dapat berjalan karena mampu mendukung pendapatan asli desa dan menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak sejalan dengan aspirasi warga yang lebih

merasakan dampak buruk ketimbang manfaatnya. Gambar kapal penyedot pasir di Sungai Musi menjadi simbol nyata aktivitas tambang. Kehadiran kapal ini tidak hanya menegaskan keberlangsungan operasi tambang, tetapi juga menjadi pemicu utama munculnya protes warga. Menurut Ketua BPD Desa Sejagung, Marmen, penutupan tambang justru dilakukan atas inisiatif perusahaan sendiri setelah adanya aksi lemparan terhadap kapal penyedot pasir oleh warga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sebenarnya tidak menghendaki penghentian tambang, tetapi perusahaan memilih berhenti untuk sementara demi menghindari konflik yang lebih besar.

Meski demikian, sebagian warga memilih sikap netral. Mereka lebih berhati-hati dalam mengambil posisi, menunggu perkembangan situasi, dan lebih fokus pada kehidupan sehari-hari. Pandangan berbeda juga datang dari anggota BPD, Ibu Husnita, yang menilai warga terlalu tergesa-gesa melakukan demonstrasi tanpa lebih dulu meminta klarifikasi tentang dokumen perizinan tambang. Menurutnya, ada jalur komunikasi formal yang bisa ditempuh, namun warga sudah terlanjur emosi dan langsung bergerak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga desa, termasuk BPD yang seharusnya menjadi penghubung aspirasi.

Upaya mediasi yang digagas pemerintah desa pun tidak membuahkan hasil. Ketua RT, menuturkan bahwa masyarakat menolak hadir dalam forum tersebut karena menganggapnya sia-sia. Bagi mereka, mediasi hanya akan berujung pada janji tanpa perubahan nyata, sementara yang mereka inginkan hanyalah penutupan tambang. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan menolak mediasi bukan semata karena komunikasi yang kurang, tetapi lebih disebabkan oleh kekecewaan mendalam terhadap pengalaman sebelumnya. Selain itu, Kepala Dusun menambahkan bahwa perusahaan memang secara bertahap mengurangi operasionalnya bukan hanya karena tekanan masyarakat, melainkan juga karena kualitas pasir sudah menurun dan tidak lagi ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika penghentian tambang dipengaruhi oleh dua faktor: desakan warga dan pertimbangan bisnis perusahaan.

Situasi tersebut mencerminkan krisis kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa. Warga merasa suara mereka diabaikan, sehingga lebih memilih aksi demonstrasi sebagai saluran utama untuk menegaskan sikap. Demonstrasi bagi masyarakat tidak hanya sekadar bentuk protes lingkungan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap relasi kekuasaan yang timpang, di mana kebijakan desa dianggap lebih berpihak kepada perusahaan ketimbang kepada kepentingan warga. Dalam perspektif Touraine, dimensi oposisi di Desa Sejagung terwujud melalui kesadaran masyarakat bahwa perusahaan tambang menjadi ancaman langsung terhadap kelestarian sungai dan kehidupan sehari-hari. Perusahaan ditempatkan sebagai lawan utama karena dianggap menyebabkan kerusakan ekosistem, sementara pemerintah desa dipandang sebagai hambatan struktural akibat lemahnya sikap tegas dalam menghadapi dampak penambangan. Kesadaran ini

mempertegas arah gerakan masyarakat: menolak tambang pasir dan mendesak pihak berwenang agar lebih berpihak pada kepentingan warga. Dengan demikian, oposisi dalam gerakan ini tidak hanya ditujukan pada perusahaan, tetapi juga mencakup kritik terhadap sistem pengambilan keputusan yang tertutup dan tidak partisipatif.

2. Dimensi Totalitas

Dimensi totalitas dalam teori gerakan sosial Alain Touraine menjelaskan bahwa setiap gerakan sosial selalu memiliki keterkaitan dengan sistem yang lebih besar, baik itu kebijakan, struktur sosial, ekonomi, maupun politik yang membentuk dinamika konflik. Melalui dimensi ini dapat dipahami bahwa perjuangan kelompok masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam suatu kerangka yang menciptakan peluang sekaligus hambatan. Dalam kasus penolakan tambang pasir di Desa Sejangung, dimensi totalitas tampak jelas melalui hubungan erat antara konflik lokal dengan sistem pertambangan nasional, regulasi lingkungan, serta struktur pemerintahan desa. Perlawanan masyarakat tidak hanya diarahkan kepada perusahaan sebagai pelaku langsung, tetapi juga merupakan bentuk respons terhadap kebijakan dan aturan yang memungkinkan aktivitas tambang tetap berjalan. Hal ini menegaskan bahwa gerakan warga Desa Sejangung tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

Kekhawatiran masyarakat semakin kuat ketika tanda-tanda kerusakan lingkungan mulai tampak. Tebing sungai mengalami erosi, air menjadi keruh seperti berminyak, dan kebisingan dari mesin penyedot pasir terdengar hampir sepanjang waktu. Kondisi ini menimbulkan rasa cemas terutama bagi warga yang rumahnya berada di tepi sungai. Banyak keluarga merasa takut akan ancaman longsor, sementara sebagian lainnya terganggu secara langsung dengan bisingnya mesin. Seorang warga, mengisahkan bahwa suara keras dari alat berat membuat anaknya sulit tidur. Setiap malam keluarganya harus menghadapi kebisingan yang membuat anak-anak gelisah dan sering menangis, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar karena kesehatan dan kenyamanan keluarganya ikut terancam.

Keresahan yang dialami warga bukanlah hal yang dibuat-buat, melainkan lahir dari pengalaman sehari-hari. Situasi ini mendorong terbentuknya solidaritas warga dalam wadah "*Masyarakat Sejangung Bersatu*" yang kemudian menjadi basis kolektif untuk menyusun strategi gerakan. Salah satu strategi yang menonjol adalah aksi demonstrasi. Aksi tersebut dilakukan untuk memberi tekanan kepada pemerintah desa maupun perusahaan agar menghentikan aktivitas tambang yang dianggap merusak lingkungan. Demonstrasi ini bukan hanya sekadar protes spontan, melainkan representasi dari perjuangan warga untuk menegaskan posisi mereka dalam konflik lingkungan. Kehadiran masyarakat dalam jumlah besar di kantor Bupati Banyuasin menjadi simbol ketidakpuasan sekaligus upaya kolektif agar aspirasi mereka mendapat perhatian serius. Dalam salah satu demonstrasi, Slamet menyatakan bahwa aksi tersebut adalah perjuangan agar suara masyarakat tidak diabaikan. Ia menegaskan bahwa tambang hanya menguntungkan

perusahaan, sementara kerugiannya harus ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Gerakan ini memperlihatkan transformasi dari isu lokal menuju agenda yang lebih luas. Penolakan tambang pasir tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghentikan kerusakan lingkungan di Desa Sejagung, tetapi juga sebagai bentuk perjuangan menjaga kelestarian ekosistem Sungai Musi yang menjadi sumber penghidupan banyak orang. Di titik inilah dimensi totalitas tampak nyata, karena perjuangan masyarakat Sejagung terhubung dengan isu keberlanjutan lingkungan, perlindungan mata pencaharian, serta keadilan ekologis.

Selain itu, media daring seperti YouTube turut memperkuat gaung gerakan ini. Dokumentasi aksi yang disebarakan melalui kanal berita lokal membuat isu yang awalnya bersifat lokal menjadi perhatian lebih luas, bahkan hingga ke tingkat regional. Penyebaran informasi ini menambah legitimasi gerakan, menarik simpati dari pihak luar, serta memberikan tekanan moral kepada pemangku kebijakan agar bertindak. Dengan demikian, media berperan penting bukan hanya sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperluas jangkauan perjuangan warga. Dimensi totalitas dalam kasus ini juga tampak dari cara masyarakat mengaitkan kerusakan sungai dengan hak generasi mendatang. Warga menilai bahwa apabila sungai terus ditambang, maka anak cucu mereka tidak lagi dapat menikmati manfaat dari ekosistem tersebut. Kesadaran inilah yang memperkuat gerakan sehingga tuntutan masyarakat tidak berhenti pada persoalan teknis, melainkan mencakup nilai-nilai keberlanjutan hidup bersama.

Dengan demikian, dimensi totalitas menunjukkan bahwa gerakan masyarakat Sejagung merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar. Penolakan terhadap tambang pasir tidak hanya ditujukan kepada perusahaan, tetapi juga sebagai kritik terhadap kebijakan dan struktur sosial-politik yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik di Desa Sejagung bukanlah sekadar permasalahan teknis mengenai aktivitas penambangan, melainkan juga menyangkut persoalan keadilan sosial, distribusi manfaat, dan legitimasi kebijakan pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Gerakan ini menegaskan bahwa masyarakat mampu menjadi aktor politik yang aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, bukan hanya objek dari kebijakan pembangunan yang seringkali menyingkirkan suara warga. Perlawanan warga Sejagung memperlihatkan keterhubungan antara isu lokal dengan agenda nasional maupun global mengenai tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Kehadiran aksi demonstrasi, pembentukan wadah organisasi, serta pemanfaatan media sebagai instrumen advokasi menegaskan bahwa strategi gerakan sosial politik masyarakat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terstruktur dan memiliki arah yang jelas.

Selain itu, gerakan ini juga dapat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran ekologis dan solidaritas kolektif yang melampaui kepentingan individu.

Warga yang sebelumnya pasif, lambat laun terlibat aktif dalam berbagai aksi, yang pada gilirannya memperkuat identitas mereka sebagai komunitas yang berdaulat atas ruang hidupnya. Dimensi totalitas dalam konteks ini mencerminkan keterhubungan erat antara dinamika lokal dengan tantangan global, yaitu bagaimana masyarakat akar rumput berhadapan dengan praktik kapitalisme ekstraktif yang cenderung mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, perjuangan masyarakat Sejagung dapat dipandang sebagai representasi dari gerakan agraria kontemporer di Indonesia yang menuntut keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Gerakan ini menjadi pelajaran penting bahwa tanpa adanya tata kelola sumber daya alam yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada warga, konflik serupa sangat mungkin akan terus berulang di berbagai daerah.

Gerakan ini juga menegaskan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan agraria bukanlah semata-mata persoalan lahan, tetapi menyangkut hak untuk hidup bermartabat. Bagi warga Sejagung, tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan sumber identitas, sejarah, dan ikatan sosial yang menjaga kesinambungan antar generasi. Oleh sebab itu, konflik yang muncul tidak hanya dipahami sebagai sengketa kepemilikan, melainkan juga sebagai ancaman terhadap eksistensi sosial-budaya mereka. Hal inilah yang menjadikan perjuangan mereka lebih bernuansa politis sekaligus moral, karena terkait erat dengan wacana hak asasi manusia dan keberlanjutan kehidupan.

Lebih jauh lagi, keterlibatan berbagai aktor pendukung seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga jaringan media alternatif turut memperluas gaung gerakan ini. Kehadiran mereka membantu membuka ruang dialog yang lebih luas, sekaligus memberi tekanan politik kepada pemerintah dan perusahaan agar lebih peka terhadap suara masyarakat. Interaksi lintas aktor ini menciptakan semacam solidaritas lintas ruang dan kelas, yang memperkuat posisi tawar warga desa dalam menghadapi dominasi kapital dan kekuasaan negara.

Dengan demikian, gerakan Sejagung menjadi semacam miniatur dari perlawanan agraria yang lebih luas di Indonesia, di mana komunitas lokal berusaha merebut kembali hak atas ruang hidupnya di tengah gelombang globalisasi dan eksploitasi sumber daya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan hanya mungkin tercapai apabila prinsip demokrasi ekologis benar-benar diterapkan, yaitu tata kelola sumber daya yang mengedepankan keterlibatan warga, menghargai keanekaragaman hayati, dan menjamin keadilan sosial. Apabila hal ini diabaikan, maka konflik agraria akan terus menjelma dalam berbagai bentuk, meninggalkan jejak ketidakadilan yang semakin kompleks.

Dapat ditegaskan bahwa kasus Sejagung tidak hanya mencerminkan problem agraria yang bersifat lokal, melainkan juga merepresentasikan dinamika struktural yang lebih luas dalam konteks politik agraria Indonesia. Gerakan masyarakat Sejagung menghadirkan realitas bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam bukanlah sekadar pertarungan antara warga dengan perusahaan,

melainkan juga melibatkan peran negara yang kerap kali berdiri di persimpangan antara kepentingan kapital dan tuntutan rakyat. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan fundamental dalam paradigma pembangunan yang masih dominan mementingkan pertumbuhan ekonomi, tanpa diimbangi dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Lebih jauh lagi, pengalaman masyarakat Sejangung mengajarkan bahwa perjuangan mempertahankan ruang hidup tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun kesadaran kolektif, solidaritas lintas aktor, serta keberanian untuk menyuarakan alternatif pembangunan yang berpihak pada rakyat. Gerakan ini menjadi bukti bahwa ketika warga diberi ruang partisipasi yang luas, mereka mampu menghadirkan solusi berbasis kearifan lokal yang justru lebih adaptif terhadap tantangan ekologis dan sosial. Dengan demikian, demokrasi ekologis bukan hanya sebuah wacana normatif, melainkan tuntutan nyata yang lahir dari pengalaman empirik masyarakat akar rumput.

Dalam kerangka itu, perjuangan Sejangung dapat dipandang sebagai alarm kritis bagi negara bahwa praktik tata kelola sumber daya alam yang elitis, eksklusif, dan sarat kepentingan kapital akan selalu memicu resistensi. Sebaliknya, apabila negara berani mengambil langkah progresif dengan membuka ruang dialog yang transparan, menyusun kebijakan yang partisipatif, serta memastikan distribusi manfaat yang adil, maka potensi konflik agraria dapat ditekan dan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan bisa tercapai.

Dengan segala kompleksitasnya, gerakan masyarakat Sejangung akhirnya menjadi cermin bagi perjalanan panjang politik agraria di Indonesia. Ia memperlihatkan bahwa isu agraria bukan hanya tentang tanah, melainkan tentang hak hidup, identitas budaya, dan masa depan generasi. Karena itu, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa jalan menuju pembangunan yang berkeadilan harus bertumpu pada keberanian untuk merombak paradigma lama, menggantinya dengan tata kelola sumber daya yang humanis, ekologis, dan demokratis. Tanpa itu, sejarah akan terus berulang, dengan konflik-konflik agraria baru yang hanya melahirkan luka sosial yang mendalam.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap strategi gerakan sosial politik masyarakat Desa Sejangung, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan utama yang menyoroti kompleksitas perlawanan terhadap pertambangan pasir. Temuan pertama, gerakan ini tidak hanya berakar dari keresahan ekologis, melainkan juga dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa dan perusahaan yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada kepentingan warga. Masyarakat, melalui wadah Masyarakat Sejangung Bersatu, secara sadar mengorganisasi diri untuk melawan dominasi perusahaan dan ketertutupan pemerintah, menunjukkan pergeseran identitas dari objek kebijakan menjadi subjek perubahan. Strategi utama mereka, seperti demonstrasi dan pemanfaatan media, menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah bentuk perlawanan politik terhadap relasi kekuasaan yang timpang, bukan sekadar protes lingkungan. Temuan kedua, melalui

analisis dimensi totalitas Touraine, konflik lokal di Desa Sejangung terhubung erat dengan isu-isu yang lebih luas, seperti keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari perjuangan agraria yang lebih besar, di mana warga berupaya menegaskan hak mereka atas ruang hidup yang layak bagi generasi mendatang. Singkatnya, strategi gerakan di Sejangung adalah representasi dari perjuangan kolektif yang menantang paradigma pembangunan ekstraktif dan menuntut demokrasi ekologis yang lebih substantif.

Meskipun penelitian ini berhasil mengungkap dinamika strategi gerakan sosial politik di Desa Sejangung, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini berfokus pada studi kasus tunggal, sehingga temuannya mungkin tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya ke konteks lain dengan karakteristik sosial dan politik yang berbeda. Kedua, data penelitian bergantung pada narasi dari informan yang terlibat langsung dalam konflik, yang berpotensi memiliki bias terhadap pihak-pihak yang berlawanan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan kasus-kasus konflik agraria serupa di daerah lain untuk mengidentifikasi pola-pola strategi gerakan yang lebih umum. Selain itu, penelitian di masa depan dapat memperluas fokus dengan menganalisis peran dan efektivitas aktor pendukung, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jaringan media, dalam memperkuat gerakan masyarakat lokal. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai jaringan advokasi dan kekuatan tawar-menawar warga dalam menghadapi dominasi kekuatan ekonomi dan politik.

Daftar Pustaka

- Aidin, A. (2020). Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3), 506–514. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1254>
- Aribowo. (2020). *Peta Teori Gerakan Sosial*. Airlangga University Press.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 26(August 2000), 611–639. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social movements: An introduction*. Blackwell Publishing.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2022). *Social movements: An introduction*. Wiley-Blackwell.
- Dewi, F., Wulandari, R., & Widiastuti, R. (2023). Konflik pertambangan pasir dan gerakan sosial masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(1), 45–58.
- Emzir, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Eric Hiariej, K. S. (2018). *Politik Kewargaaan Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3.
- Hidayat, R., & Nurani, A. (2019). Dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar sungai. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 11(3), 45–57.

- Indriani, S., Wardhani, R., & Santoso, B. (2024). Analisis dampak penambangan pasir terhadap abrasi di wilayah pesisir. *Jurnal Geografi Indonesia*, 9(2), 112-125.
- Kurniawan, A., & Fitriani, A. (2023). Analisis dampak sosial ekonomi dan lingkungan pertambangan pasir di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 201-215.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pokhrel, S. (2024). Dampak sosial dan lingkungan pada penambang. *Αγαη*, 15(1), 37-48.
- Pratama, B., Putra, A., & Lestari, S. (2024). Peran gerakan masyarakat dalam menuntut keadilan ekologis. *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 6(1), 78-90.
- Puspitasari, D., & Rahman, F. (2021). Perlawanan masyarakat terhadap tambang pasir: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 67-82.
- Sari, W., Budiarto, R., & Setyawan, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 150-165.
- Sudaryono. (2023). *Metodologi penelitian: Penelitian lapangan*. Andi Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiani, K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2024). Gerakan Sosial dalam Penolakan Pertambangan di Sungai Saddang. 7, 94-108.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics*. Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers.
- Tilly, C. (2021). *Social movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers.
- Touraine, A. (2002). *The voice and the eye: An analysis of social movements*. Cambridge University Press.
- Wijayanti, L., & Pratama, R. (2018). Konflik lingkungan dan strategi gerakan masyarakat desa terhadap penambangan pasir. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 88-102.